

REKAP DATA PENYAMPAIAN ASPIRASI TAHUN 2020

NO	HARI/TANGGAL	ASAL	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	JUMLAH MASSA	TEMPAT PERTEMUAN	ANGGOTA DPRD YANG MENERIMA	KOMISI	KETERANGAN TINDAK LANJUT	KET
1	Kamis, 23 Januari 2020	Aliansi Ninik Mamak adat salingka nagari Kab.Sijunjung	<p>Mendorong secepatnya dan mengawasi realisasi hutan adat di tanah ulayat yang ada di Provinsi Sumatera Barat umumnya sesuai dengan mekanisme, karena saat ini masyarakat sijunjung banyak mencari hidup didalamnya</p> <p>Mendorong secepatnya dan mengawasi realisasi sertifikasi komunal atas tanah masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Permen ATR/BPN N. 10/2016 tentang cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu</p> <p>DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan kepada Kapolda Sumatera Barat beserta jajarannya untuk memberikan izin/akses supaya masyarakat hukum adat bisa lagi beraktifitas seperti semula di tanah ulayat ( Hutan Adat ) yang status tanah ulayat ( Hutan Adat ) berfungsi sebagai areal penggunaan lain ( APL ). Yang lazimnya disebut oleh negara Diluar kawasan Hutan.</p> <p>Selaku pemangku hak ulayat dan ninik mamak sebagai pimpinan anak cucu keponakan kami tidak menginginkan timbul hal-hal yang tidak kondusif di daerah kami karena masalah ekonomi dan penegakan hukum tanpa solusi.</p> <p>1. Harapan masyarakat Sijunjung agar DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai wakil rakyat segera menanggapi aspirasi yang disampaikan dan tolong perjuangkan nasib masyarakat. Permintaan masyarakat kepada pemerintah tolong carikan solusi apa usaha yang bisa dilakukan untuk menghidupi anak kemenakan saat ini karena tidak ada lagi usaha yang dilakukan.</p>	lbh krg 100 org	ruang khusus I	Muzli M.Nur, Eviyandri rajo Budiman, Syharul Furqon (Dapil Sijunjung, Damasraya), DR. Kurniawarman (tenaga ahli)	Komisi I, Anggota DPRD Dapil VI, Tenaga Ahli DPRD	Massa diterima diruang khusus I atas aspirasi/tuntutan akan ditindak lanjut oleh Komisi I, data yang diminta oleh Komisi I pada saat pertemuan untuk dilengkapi oleh pengunjuk rasa dan segera diserahkan ke komisi I sebagai bahan rapat oleh DPRD ( Komisi I dengan pihak-pihak terkait)	
1	Senin, 27 Januari 2020	Forum Masyarakat Minangkabau	<p>Semua wisatawan cina harus keluar dari sumatera barat dalam waktu 2 x 24 jam teritung dari waktu kedatangan</p> <p>Membatalkan jadwal kedatangan wisatawan cina berikutnya yaitu tanggal 31 januari 2020</p> <p>tidak menerima wisatawan asa cina sampai wabah virus corona dinyatakan aman/tidak ada lagi oleh World Health Organization (WHO)</p> <p>Menolak/melarang semua impor makanan dalam bentuk apapun dari Cina</p> <p>Segera melakukan pemakhzulan terhadap Gubernur Sumatera Barat</p> <p>Menyatakan kecewa dengan seluruh walikota/bupati yang tetap menerima turis cina di daerahnya serta meminta DPRD Sumbar agar menegur mereka</p> <p>Agar perizinan Coco's Tour PT. Arkian Intrawisata ditinjau ulang ulang dan tidak boleh beroperasi di Sumatera Barat karena mengabaikan kesehatan serta keselamatan warga sumatera barat</p>	lbh krg 100	Ruang Khusus I	Irsyad Syafar, Kepala Dinas Pariwisata Prov.Sumbar, Ka.biro humas Setdaprov sumbar		massa sudah diterima oleh anggota DPRD	
2	Jumat, 14 Februari 2020	Aliansi Masyarakat Minang Sumatera Barat	Pemerintah belum serius menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskan operasi OTT Komisioner KPU/ Kasus Mega korupsi yang sampai saat ini tidak jelas penanganannya antara lain Hoggo selaku direktur PT.trans pasific petrochemical indotama, Kasus Jiwasraya, kasus PT.Asabri	lbh krg 200	ruang khusus	Irsyad Syafar	Wakil Ketua DPRD	Perwakilan diterima oleh Wakil ketua DPRD dan DPRD sudah menyampaikan aspirasi ke DPR RI ( bukti pengiriman terlampir)	

3	Kamis, 27 Februari 2020	Komando	Aplikasi memberatkan driver	lbh krg 100	ruang rapat pimpinan DPRD	Suwirpen Suib	Wakil Ketua DPRD	Perwakilan diterima oleh wakil ketua DPRD dan Dinas Perhubungan, DPRD akan mengirimkan tuntutan drive ke menteri perhubungan	
4	Rabu, 4 Maret 2020	Aliansi BEM Sumbar	Penolakan RUU OmnibusLaw	lbh krg 300 org	Depan Gerbang DPRD	Bakri Bakar, Zarfi Derson	Komisi I	3 org perwakilan mahasiswa diterima oleh Sekretariat (Sekwan,Kabag) dan anggota DPRD Bakri Bakar di Ruang rapat Sekwan. Anggota DPRD Bakri Bakar, Zarfi Derson didampingi oleh Sekretariat menemui mahasiswa yang berada di luar gedung. Mahasiswa memaksa untuk masuk ke pekarangan gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasinya namun demi keamanan kepolisian tidak mengizinkan masuk. Mahasiswa bertahan sampai dengan pukul 16.00 Wib untuk tetap masuk dan menemui ketua DPRD namun mahasiswa tetap tidak diizinkan. Mahasiswa membubarkan diri pukul 16.30 wib dan aksi rencana akan dilanjutkan pada tgl 11 maret 2020 pukul 13.30 wib	
5	Rabu, 11 Maret 2020	Aliansi BEM Sumbar	Penolakan RUU Omnibuslaw dengan tuntutan sbb : 1. Menuntut DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU Omnibuslaw. 2. Menuntut adanya ruang partisipasi bagi mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap rancangan Undang-undang. 3/ Menuntu agar ketua DPRD Sumbar sebagai representatif warga sumatera barat untuk menolak RUU Omnibus Law	lbh keg 300 org	depan gerbang DPRD	Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD ( Irsyad Syafar,Suwirpen) Eviandri (sekretaris Komisi I) Yusuf Abit ( Ketua Komisi V ) 1		mahasoswa diterima didepan gerbang oleh ketua, wakil ketua dprd, ketua komisi v, wakil ketua komisi I dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat tuntutan mahasiswa ke DPR RI, Presiden RI pada tanggal 11 Maret 2020.	
6	Kamis, 12 Maret 2020	Forum Masyarakat Minangkabau	1. Masalah ustad alfian tanjung dimohon kepada DPRD agar memberikan perlindungan supaya tidak ada kriminalisasi terhadap ulama di sumatera barat, karena saat ini kasus ust.alfian tanjung sedang dalam proses di polres bukittinggi terkait ceramah agamanya tentang PKI di mesjid 13 kaum 2. terkait RUU Omnibus law agar DPRD Prov.Sumbar menindaklanjuti suara mahasiswa dan masyarakat untuk menolak RUU Omnibus Law 3. Tidak ada lagi pemilihan putri-putri yang mengatasnamakan Sumatera Barat	7 org	ruangan ketua DPRD Prov.Sumbar	Ketua DPRD ( Supardi )	Ketua DPRD	rombongan sebanyak 5 orang diterima oleh ketua DPRD Prov.Sumbar dan aspirasi yang disampaikan telah diterima oleh Ketua DPRD.	
7	Senin, 6 Juli 2020	Forum Masyarakat Minangkabau	penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila	50 org	ruangan khusus I . Ketua	Ketua DPRD ( supardi ) Eviyandri rajo Budiman (Sekretaris Komisi I)		Diterima oleh Ketua DPRD dan aspirasi telah diteruskan ke DPR RI dna MPR RI sesuai dengan tuntutan FMM	

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
SEKRETARIS

RAFLIS, SH, MM  
NIP. 19640930 198602 1 002